Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR AMPAH KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Wulandari [1], Irza Setiawan [2], Nida Urahmah [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: wlnr1905@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Pasar Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, saat ini belum berjalan maksimal karena dipicu oleh penumpukan sisa buangan, fasilitas yang minim, nihilnya pemilahan, serta rendahnya kepedulian masyarakat sekitar. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi terhadap 11 informan, riset ini membedah dinamika manajemen kebersihan di area tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa operasional lapangan seperti pengumpulan dan pengangkutan limbah harian sudah berjalan cukup konsisten berkat pembagian tugas yang jelas. Meski demikian, kelemahan mendasar masih terlihat pada buruknya perencanaan program kerja, tidak adanya target capaian yang terukur, serta absennya sistem pemilahan sejak dari sumbernya. Selain itu, perilaku pedagang dan pengunjung yang acuh terhadap kebersihan menjadi kendala pelik di lapangan. Faktor pendukung utama sejauh ini hanyalah rutinitas kerja petugas kebersihan yang terawasi dengan baik. Sebaliknya, keterbatasan armada, minimnya wadah pembuangan, dan kurangnya personel menjadi hambatan utama yang krusial. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup bersama UPTD pasar setempat didesak untuk segera menambah sarana prasarana, menggalakkan edukasi persuasif, serta memperketat pengawasan demi mewujudkan lingkungan niaga yang lebih sehat.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Pasar Ampah, Hambatan lingkungan

ABSTRACT

Waste management at Ampah Market, Dusun Tengah District, East Barito Regency, is currently not optimal due to the accumulation of waste, minimal facilities, a lack of sorting, and low awareness from the surrounding community. Using a descriptive qualitative approach, including interviews and observations with 11 informants, this research examines the dynamics of cleanliness management in the area. The evaluation results indicate that field operations, such as daily waste collection and transportation, have been running fairly consistently thanks to a clear division of tasks. However, fundamental weaknesses remain, including poor work program planning, the absence of measurable targets, and the absence of a sorting system at the source. Furthermore, the disregard for cleanliness among vendors and visitors presents a significant challenge in the field. The main supporting factor so far has been the well-supervised work routine of the cleaning staff. Conversely, limited fleet capacity, a lack of waste containers, and a shortage of personnel have become crucial obstacles. Therefore, the Environmental Agency, along with the local market's Technical Implementation Unit (UPTD), is urged to immediately expand infrastructure, promote persuasive education, and tighten supervision to create a healthier trading environment.

Keywords: *Waste management, Waste Market, Environmental barriers*

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PENDAHULUAN

Aktivitas penanganan material sisa merupakan komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemeliharaan kebersihan wilayah dan proteksi derajat kesehatan masyarakat secara kolektif. Krisis lingkungan modern ditandai dengan eskalasi volume sisa buangan yang masif, di mana data nasional menunjukkan akumulasi timbulan zat sisa di Indonesia telah menembus angka 68,5 juta ton setiap tahunnya berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2025). Sebagai episentrum transaksi ekonomi dan interaksi sosial masyarakat, keberadaan pasar tradisional memegang andil yang sangat besar terhadap akumulasi material buangan, didominasi oleh sisa produksi organik yang memiliki laju pembusukan tinggi. Apabila eksistensi sisa aktivitas ini tidak diintervensi melalui skema kerja yang terencana, terstruktur, serta berorientasi jangka panjang, maka degradasi kualitas lingkungan hidup dan penurunan indeks kesejahteraan publik menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari.

Dalam tatanan ideal, sistem penanggulangan sisa domestik wajib mengintegrasikan rantai operasional yang sirkular dan komprehensif. Alur tersebut idealnya diawali dari pemisahan jenis material, pengumpulan terpadu, mobilisasi angkutan, proses konversi nilai guna, hingga eliminasi akhir di lokasi pemrosesan. Efektivitas mekanisasi sistemik ini bertumpu pada ketersediaan instrumen fisik, pemenuhan prasarana pendukung, serta komitmen kooperatif dari seluruh elemen pasar, mulai dari jajaran pengelola, satuan tugas kebersihan, pelaku usaha dagang, hingga elemen pengunjung. Namun, kondisi empiris di lapangan sering kali menunjukkan anomali, di mana tata kelola area niaga konvensional masih terjebak dalam dilema kultural berupa rendahnya kepedulian perilaku komunal, keterbatasan pasokan fasilitas sanitasi, serta lemahnya sinergi otoritas antar pemangku kebijakan.

Zat buangan atau sisa sisa utilitas didefinisikan sebagai sisa dari siklus aktivitas harian manusia atau konsekuensi dari dinamika alam yang berwujud material padat. Istilah ini merujuk pada segala komponen material yang kegunaannya telah habis atau tidak lagi dikehendaki oleh pemiliknya setelah selesainya suatu proses konsumsi domestik maupun institusional. Kehadiran tumpukan zat sisa ini paling sering dijumpai pada ruang-ruang publik, menjadikannya isu sanitasi darurat yang menuntut penyelesaian segera karena dampaknya yang langsung bersinggungan dengan kesehatan masyarakat. Mengingat area komunal berfungsi sebagai titik temu bertemunya berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang heterogen, pemenuhan standar sanitasi mutlak diimplementasikan demi menjamin fungsi proteksi, pemeliharaan, serta peningkatan derajat kebugaran fisik masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.

Pasar tradisional merupakan salah satu representasi ruang publik yang memproduksi sisa buangan dalam skala masif secara kontinu. Dalam perspektif institusi ekonomi, pasar diartikan sebagai wadah pertemuan terorganisasi antara pihak yang mendistribusikan komoditas barang atau jasa dengan pihak konsumen melalui mekanisme transaksi yang sistematis. Kehadiran pasar menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi makro maupun mikro, di mana fungsionalitasnya sebagai lembaga niaga tidak dapat dilepaskan dari dinamika sirkulasi modal dan interaksi intensif antara pedagang dan pembeli. Upaya pengendalian ekosistem pasar telah dipayungi oleh regulasi yuridis formal, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta transformasi paradigma agar zat sisa dipandang sebagai sumber daya alternatif melalui manajemen yang terintegrasi menyeluruh.

Sebagai kerangka operasional di tingkat regional, perencanaan berbasis partisipasi masyarakat menjadi fundamen utama sebelum mengeksekusi program di lapangan. Formulasi strategi ini bertindak sebagai basis standardisasi penanganan, baik untuk klaster rumah tangga individual maupun klaster kawasan komersial. Sejalan dengan urgensi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat pedoman penyelenggaraan pengelolaan sampah secara komprehensif, mencakup klaster pembatasan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

timbulan, penanganan teknis, pengawasan berkala, hingga optimalisasi peran serta masyarakat sipil demi mewujudkan tata ruang yang higienis dan berkelanjutan. Poin krusial ini menuntut adanya sinkronisasi yang kuat antara aturan normatif di atas kertas dengan realitas sosiologis yang berkembang di tengah ekosistem pasar rakyat.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan laju akumulasi zat sisa melesat tajam, tidak hanya berbanding lurus dengan dinamika pertumbuhan demografi, tetapi juga dipicu oleh pergeseran gaya hidup modern dan pola konsumsi masyarakat yang kian konsumtif. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas daya tampung serta kelemahan sistem mitigasi yang dijalankan oleh masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2009) dalam studinya mengenai sosiologi lingkungan, keberadaan eksistensi manusia dan residu buangan adalah dua hal yang koeksisten dan tidak dapat dipisahkan. Apabila material buangan tersebut diabaikan tanpa adanya tindakan pemrosesan yang tepat sejak dari hulu atau sumbernya, maka ekses negatif akan menjalar ke berbagai sektor vital, mulai dari penurunan status kesehatan, konflik sosial, kerugian ekonomi, hingga pudarnya estetika tata ruang. Oleh sebab itu, intervensi kebijakan publik yang beralih fungsi sebagai instrumen pelayanan prima dari negara mutlak dibutuhkan melalui regulasi yang taktis dan solutif (Fitri dkk., 2019).

Anomali tata kelola lingkungan ini juga melanda wilayah Pulau Kalimantan, khususnya pada konsetrasi wilayah Kabupaten Barito Timur yang mencatatkan grafik pertumbuhan penduduk mencapai 2,5% setiap tahun berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS, 2025). Lonjakan kuantitas demografi ini berimplikasi langsung terhadap penambahan volume sisa buangan pada area pelayanan publik, termasuk pasar-pasar tradisional. Pembiaran tanpa tata kelola yang terukur berisiko tinggi memicu malapetaka ekologis serta mempercepat transmisi penyakit menular berbasis lingkungan, seperti epidemi demam berdarah dengue (DBD) yang dilaporkan mengalami tren peningkatan kasus secara signifikan di wilayah tersebut. Salah satu titik krusial yang menghadapi rapor merah penataan lingkungan adalah Pasar Ampah yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Dusun Tengah.

Berdasarkan hasil pengamatan empiris di lokasi Pasar Ampah, ditemukan beberapa manifestasi kegagalan sistemik yang membutuhkan perhatian serius, antara lain:

1. Defisit sarana pendukung fisik yang ditandai dengan minimnya kuantitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta belum tersedianya fasilitas pemilahan kompartemen sampah antara kategori organik dan anorganik.
2. Rendahnya kesadaran moral kolektif dari para pelaku pasar dalam mematuhi zonasi pembuangan dan pemisahan material sisa.
3. Lemahnya fungsi monitoring dan penegakan sanksi dari otoritas pengawas pasar, yang berakibat pada pembiaran tumpukan limbah padat di koridor internal pasar.

Dampak dari karut-marut ini melahirkan implikasi buruk berupa timbunan material busuk, penyebaran aroma menyengat yang mengganggu pernapasan, serta akumulasi genangan air lindi (cairan sampah) yang berpotensi merembes dan mencemari ekosistem air tanah di sekitar pasar.

Realitas objektif di Pasar Ampah mengonfirmasi bahwa problematika yang dihadapi tidak sekadar bertumpu pada persoalan teknis pengangkutan logistik kebersihan semata, melainkan berakar pada disfungsi sistem manajemen secara holistik. Kendati pemerintah pusat telah mengundangkan instrumen progresif berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular, realisasinya pada level pasar tradisional di daerah masih membentur dinding tebal. Berangkat dari urgensi tersebut, studi kualitatif deskriptif ini diinisiasi untuk menguliti anatomi pengelolaan sampah di Pasar Ampah beserta hambatan-hambatan strukturalnya melalui triangulasi data observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Riset ini diarahkan untuk memberikan peta rekomendasi taktis bagi pemangku kebijakan dengan tajuk ilmiah: "Pengelolaan Sampah di Pasar Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur."

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Untuk membedah fenomena ini secara ilmiah, diperlukan pisau analisis berupa teori manajemen universal. Terry (2019:15) mengemukakan sebuah proposisi bahwa pengelolaan atau tata laksana yang terorganisasi wajib bersandar pada empat pilar fungsi pokok yang dikenal dengan akronim POAC, yakni Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan/Pengarahan), dan Controlling (Pengawasan). Secara etimologis, kata pengelolaan diserap dari konsep manufaktur barat "management" yang mengandung esensi sebagai tindakan mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan. Pengelolaan dipandang sebagai sirkuit proses tersistem untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dengan cara menggerakkan seluruh aset internal demi meraih target yang telah dicanangkan. Proses ini memadukan kepemimpinan yang kuat dengan ketepatan alokasi sumber daya agar seluruh komponen organisasi dapat bergerak harmoni dalam satu garis komando.

Para sarjana administrasi dan manajemen memberikan formulasi definisi yang variatif namun memiliki benang merah yang sama. Siagian dalam karyanya "Filsafat Administrasi" memberikan penekanan bahwa tata kelola merupakan manifestasi kemampuan atau keterampilan manajerial untuk mengamankan sebuah capaian atau output kerja melalui kontribusi kerja orang lain. Sementara itu, Rachman melalui buku "Kerangka Pokok-pokok Pengelolaan" mendefinisikan aktivitas ini sebagai jalinan kegiatan yang terstruktur secara kronologis, melibatkan institusi formal maupun personil yang ditunjuk sebagai subjek pelaksana kegiatan. Di sisi lain, Ordway Tead yang gagasannya disadur oleh Rosyidi dalam literatur "Organisasi dan Pengelolaan" menitikberatkan konsep ini pada proses kepemimpinan dan pemberian arah instruksional terhadap jalannya roda organisasi demi menjamin target tidak melenceng dari kesepakatan awal. Sejalan dengan hal itu, pandangan legendaris dari Mary Parker Follet menyatakan bahwa manajemen pada hakikatnya adalah sebuah seni artistik dalam merampungkan tugas dan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi orang lain.

Secara makro, cakupan pengelolaan mengikat seluruh rangkaian ikhtiar yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam menyatukan gerak aspek sumber daya manusia, logistik material, efisiensi waktu, dan keakuratan informasi. Siklus penataan ini bertumpu pada prinsip efektivitas (melakukan hal yang benar) dan efisiensi (melakukan hal dengan benar). Penerapannya kini meluas dari domain korporasi komersial menuju sektor publik seperti pelestarian ekologi, tata pamong pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakat guna menekan potensi pemborosan anggaran. Metodologi ini kerap mengadopsi siklus dinamis PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang menuntut adanya proses evaluasi berkala demi terciptanya perbaikan mutu yang berkesinambungan.

Pondasi konseptual lain diajukan oleh Terry (2021:3) yang melihat manajemen sebagai sebuah proses khas dan distingtif, terdiri atas tindakan perencanaan yang matang, pengorganisasian lini kerja, pengarahan motivasi kerja, serta kontrol ketat guna menetapkan sekaligus merealisasikan sasaran organisasi lewat pendayagunaan modal manusia serta materiil secara paripurna. Penjelasan ini diperkuat oleh Suprihanto (2014:4) yang mengartikan manajemen sebagai kendali terpadu atas kinerja para anggota seraya mengoptimalkan seluruh modalitas organisasi. Aset organisasi yang dimaksud mencakup spektrum yang luas, melingkupi kapasitas intelektual pegawai, keahlian teknis (know-how), pengalaman empiris, kesiapan mesin, bahan baku, penetrasi teknologi, reputasi korporasi, hak paten, kekuatan finansial, hingga loyalitas dari para staf dan pengguna layanan.

Apabila dijabarkan lebih terperinci, empat fungsi POAC menurut Terry (2019:15) memiliki indikator operasional sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning): Proses memformulasikan peta jalan masa depan melalui analisis data dan fakta historis, mengorelasikannya dengan kondisi riil, serta menyusun estimasi kebutuhan logistik serta mitigasi risiko demi meraih sasaran organisasi.
2. Pengorganisasian (Organizing): Tindakan mengelompokkan klaster-klaster kerja, mendistribusikan porsi tugas secara adil kepada aparatur, serta melegitimasi batasan wewenang dan tanggung jawab formal demi membangun harmoni kerja.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

3. Pengarahan (Actuating): Langkah persuasif untuk menumbuhkan motivasi, etos kerja, dan kesadaran penuh dari seluruh elemen staf agar bergerak selaras dengan cetak biru organisasi yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan (Controlling): Proses pemantauan kinerja, pengukuran deviasi hasil di lapangan, serta pengeksekusian tindakan koreksi (pembetulan) agar performa organisasi konisten berada pada jalur rencana awal.

Dengan demikian, konklusi teoretis menunjukkan bahwa tata kelola merupakan sirkuit sistemik berkesinambungan untuk mencapai efisiensi mutlak melalui integrasi POAC di berbagai lini kehidupan.

Sisi lain dari riset ini mewajibkan pemahaman mendalam atas objek materiil, yaitu sampah. Secara yuridis, merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah diklasifikasikan sebagai sisa dari kegiatan domestik manusia atau fenomena alamiah yang berwujud padat atau semi-padat yang nilai gunanya telah habis. Zat sisa ini merupakan residu dari aktivitas manufaktur, rantai konsumsi, maupun rutinitas harian yang menuntut adanya standardisasi perlakuan khusus agar tidak berubah menjadi polutan yang mengancam keselamatan ekosistem. Wujudnya bisa berupa zat padat, zat cair, zat gas, hingga limbah radioaktif. Berdasarkan sifat biologisnya, khalayak membaginya menjadi kelompok organik (biodegradabel) yang dapat didegradasi oleh mikroorganisme pengurai, serta kelompok anorganik (non-biodegradabel) yang resisten terhadap proses pelapukan alami.

Menurut klasifikasi yang disusun oleh Panji Nugroho (2013) dalam panduan praktis pembuatan pupuk kompos, tipologi zat sisa dapat dipetakan berdasarkan dua indikator utama. Pertama, berdasarkan asal muasalnya (sumber), terdiri atas sampah alam (residu ekosistem seperti guguran daun yang terurai menjadi humus), sampah manusia (metabolit biologis berupa feses dan urin yang berisiko menyebarkan patogen virus serta bakteri jika sanitasinya buruk), sampah konsumsi (residu aktivitas belanja harian masyarakat), dan sampah industri (limbah sisa manufaktur dan ekstraksi pertambangan dalam volume besar). Kedua, berdasarkan karakteristik materialnya, terbagi atas sampah organik (sisa sayur dan buah yang potensial dikonversi menjadi pupuk penyubur tanah) serta sampah anorganik (plastik, kaca, kaleng yang memiliki nilai ekonomis sekunder jika didaur ulang menjadi kerajinan tangan atau komoditas industri sirkular). Seluruh jenis material ini membawa dampak ganda, di mana kegagalan manajemen (Mukono, 2000) akan memicu kerusakan visual, polusi udara akibat gas beracun, serta inkubasi vektor penyakit; namun pengelolaan yang bijak dapat membuka lapangan kerja baru serta mendatangkan keuntungan finansial bagi komunitas lokal. Menurut Taufiqurrahman (2016:33-35), keberhasilan mata rantai ini bertumpu pada tiga pilar teknis: ketepatan sistem pewadahan (penyimpanan sementara), efisiensi pengumpulan (mobilisasi ke TPS), dan kelancaran pengangkutan (logistik armada truk menuju TPA). Kebijakan inilah yang diadopsi dalam Perda Barito Timur No. 1 Tahun 2020 demi mewujudkan integrasi aspek pengurangan (reduce, reuse, recycle) dan penanganan akhir yang berkelanjutan.

METODE

Lokus pelaksanaan studi ilmiah ini secara spesifik ditetapkan di kawasan Pasar Ampah, yang beralamat di Jalan A. Yani, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara spasial, fasilitas niaga konvensional kebanggaan masyarakat Barito Timur ini menempati total area lahan yang cukup luas, yakni mencapai 10.600 m^2, dan beroperasi di bawah wilayah koordinat pos dengan nomor kode pos 73652. Pemilihan Pasar Ampah sebagai titik lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan ekologis yang matang, di mana pasar rakyat tersebut bertindak sebagai episentrum sirkulasi logistik, pusat transaksi ekonomi makro-mikro, serta wadah pemenuhan kebutuhan primer bagi masyarakat di Kecamatan Dusun Tengah dan sekitarnya. Implikasinya, tingginya kepadatan aktivitas jual-beli yang terjadi setiap hari secara linier

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

berbanding lurus dengan melesatnya laju produksi zat sisa atau material buangan di lingkungan tersebut. Kondisi empiris ini menjadikan Pasar Ampah sebagai objek yang sangat representatif untuk mengamati, membedah, dan menganalisis potret manajemen sanitasi serta problematika tata kelola kebersihan lingkungan pasar secara aktual, mendalam, dan komprehensif.

Penyusunan riset ini menyandarkan diri pada pendekatan kualitatif (qualitative approach), sebuah orientasi metodologi ilmiah yang menitikberatkan perhatian utamanya pada aspek pendalaman makna, penelusuran realitas fenomena, serta kualitas dari data yang dihimpun. Pendekatan kualitatif dalam studi ini diposisikan sebagai suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan kedalaman uraian deskriptif dalam bentuk paparan kata-kata atau jalinan kalimat yang dikonstruksikan secara teliti, cermat, objektif, dan runtut. Alur metodologinya bergerak secara sistematis mulai dari tahapan penjaringan data mentah di dasar lapangan, pengelompokan tema, interpretasi makna implisit, hingga pelaporan hasil temuan akhir secara holistik. Karakteristik utama dari pendekatan ini terletak pada fleksibilitasnya dalam menangkap dan mengurai dinamika sosial di lapangan tanpa harus dibatasi oleh sekat-sekat variabel kuantitatif yang kaku, sehingga peneliti dapat secara bebas mengungkap tabir sosiologis di balik rendahnya optimalisasi pengelolaan sampah di lokasi pasar tersebut.

Riset ini mengaplikasikan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk memotret realitas manajemen kebersihan secara utuh dan apa adanya. Merujuk pada pemikiran teoretis dari Rakhmat (dalam Ibrahim, 2018:59), studi deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah rancangan pencarian fakta yang dilakukan untuk melukiskan jalinan variabel demi variabel, satu demi satu, dengan mengumpulkan data secara univariat. Lebih lanjut, prinsip dasar dari tipe deskriptif ini diposisikan untuk mencari dan membangun bangunan teori-teori tentatif yang bersifat kontekstual dan dinamis di lapangan, dan bukan ditujukan untuk menguji keabsahan suatu hipotesis atau teori formal tertentu. Implementasi model deskriptif kualitatif dalam konteks ini sengaja diarahkan guna menggambarkan potret rill, keadaan mutakhir, serta dinamika aktual dari sistem penanganan limbah padat yang ada di Pasar Ampah. Guna mengekstrak data yang kredibel dari dasar lapangan, instrumen penjaringan informasi dikombinasikan melalui metode observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam kepada informan, dan pengumpulan bukti dokumentasi otentik.

Konstruksi informasi dalam riset ini ditopang oleh dua pilar klasifikasi data yang saling melengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merepresentasikan jenis data mentah orisinal yang diperoleh dan dihimpun secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lokasi penelitian melalui proses kerja lapangan secara live. Komponen data primer ini diekstraksi melalui tiga lini operasional utama, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui observasi, peneliti mengamati secara saksama pola perilaku para pedagang dalam menyingkirkan zat buangan, pemetaan ketersediaan wadah penampungan, pemantauan kondisi kebersihan koridor pasar, identifikasi ada tidaknya pemilahan fraksi organik-anorganik, serta proses pengangkutan sampah oleh kru kebersihan. Lini wawancara dijalankan melalui proses tanya jawab mendalam bersama informan terkait seperti pihak Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, pelaku usaha, serta pengunjung pasar guna menyerap informasi psikologis dan teknis yang lebih dalam. Sementara dokumentasi lapangan diwujudkan lewat pengambilan gambar visual selama penelitian yang memotret eskalasi timbunan residu, kondisi fisik TPS, dinamika kerja petugas lapangan, serta potret estetika ruang pasar secara makro.

Di sisi lain, data sekunder dalam penelitian ini diposisikan sebagai instrumen pendukung legal formal dan teoretis yang bersumber dari data yang telah ada atau diterbitkan oleh pihak lain untuk memperkuat khazanah analisis. Struktur data sekunder ini dikompilasi secara cermat dari empat instrumen dokumen utama di luar lapangan, yaitu dokumen resmi, arsip, buku/literatur, dan peraturan perundang-undangan. Dokumen resmi mencakup berkas kelembagaan dan data sektoral resmi yang diperoleh dari instansi kedinasan seperti Dinas Lingkungan Hidup serta data tata kelola internal pihak pengelolaan pasar. Dokumen arsip dimanfaatkan untuk melacak rekaman kuantitatif

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengenai demografi jumlah pedagang aktif, estimasi volume tonase sampah harian, serta daftar inventarisasi sarana-prasarana kebersihan pasar. Instrumen buku dan literatur ilmiah mencakup rujukan teoretis dari buku teks, jurnal riset terakreditasi, dan naskah skripsi terdahulu yang relevan dengan topik manajemen sampah. Terakhir, peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar pijakan hukum normatif yang kaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Penetapan subjek penyedia informasi dalam riset kualitatif ini merujuk pada individu yang bertindak sebagai informan, yaitu orang-orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk menyuplai kabar akurat mengenai situasi, kondisi, dan fakta objektif data di lapangan. Penentuan rantai informan di lapangan dieksekusi secara ketat melalui teknik Purposive Sampling, sebuah metode penentuan informan dalam penelitian kualitatif di mana peneliti memilih secara sengaja individu atau kelompok tertentu yang dianggap paling mengetahui, memahami, mendalami, dan memiliki relevansi kuat terhadap masalah atau objek yang sedang diteliti. Berdasarkan kalkulasi kebutuhan data di lapangan, diperoleh 11 orang informan kunci yang bersedia memberikan keterangan mendalam, dengan rincian formasi jabatan sebagai berikut: John Karigas, S.AP, MA selaku Kabid Pengelolaan Sampah DLH; Darwono, S.AP selaku Kepala UPTD Pasar; Cepe Arsandi selaku Petugas Pengawasan; tiga personel petugas kebersihan lapangan yaitu Andi, Rahmat, dan Beni; tiga perwakilan pelaku usaha aktif pasar yaitu Rudi (Pedagang Sembako), Tika (Pedagang Kosmetik), Abdul Khoir (Penjahit Baju); serta dua perwakilan dari elemen konsumen pasar yaitu Emer dan Ili.

Desain operasional penelitian merupakan penjabaran konsep-konsep abstrak penelitian ke dalam bentuk indikator empiris yang lebih operasional agar mudah dipahami, diamati, dan diukur secara tepat di lapangan. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengadopsi model fungsi manajemen universal dari Terry (2019:15) yang membelah aspek tata kelola ke dalam empat poros operasional utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Poros perencanaan (planning) diukur melalui dua indikator utama, yaitu perencanaan program pengolahan sampah dan penyusunan target capaian. Poros pengorganisasian (organizing) memfokuskan telaah pada struktur organisasi pengelolaan sampah serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab. Poros pelaksanaan (actuating) mendeteksi realitas teknis di lapangan yang meliputi subsistem pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pemilahan sampah. Poros terakhir, yaitu pengawasan (controlling), dipantau melalui indikator pengawasan terhadap petugas kebersihan serta bagaimana respon sikap dan perilaku pedagang terhadap kebersihan lingkungan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yang saling berkaitan secara sirkular, yaitu reduksi data (pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah dari lapangan), penyajian data (menampilkan temuan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses riset berlangsung demi mengamankan keabsahan. Agar hasil penelitian ini valid dan terhindar dari bias subjektif, peneliti melakukan uji kredibilitas data berdasarkan pemikiran Yusuf (2017) dan Lapau (2017) melalui enam jalur pengujian ilmiah. Jalur tersebut meliputi perpanjangan waktu penelitian di lapangan guna memantau konsistensi fenomena; meningkatkan ketekunan pengamatan untuk menjaga keakuratan data; melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna menyilangkan kebenaran informasi; melaksanakan member checks dengan menguji kembali draf kesimpulan kepada anggota kelompok asal data diperoleh; menganalisis kasus negatif dengan mencari data yang bertentangan; serta menggunakan referensi literatur yang sangat tepat untuk memperkuat derajat kepercayaan data riset.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sampah di Pasar Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur

1. Perencanaan

a. Perencanaan program pengolahan sampah

Formulasi program pengelolaan sisa buangan sejatinya merupakan langkah strategis untuk merancang peta jalan penataan kebersihan di Pasar Ampah, yang mencakup penyusunan agenda sanitasi rutinan, pemenuhan logistik fasilitas, hingga teknik mitigasi timbulan material buangan. Namun, data empiris di lapangan mengonfirmasi bahwa tahapan perencanaan program di area niaga ini masih sangat lemah. Disfungsi ini dipicu oleh pembatasan birokrasi, di mana UPTD Pasar tidak memiliki legitimasi yuridis untuk mengadakan sarana fisik penunjang karena kewenangan tersebut mutlak berada di bawah otoritas Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Otoritas pasar hanya dibebani tanggung jawab teknis operasional dalam memindahkan material buangan dari koridor lapak menuju lokasi TPS terdekat.

Melalui pengamatan langsung, keterbatasan instrumen fisik tercermin nyata dari penggunaan armada gerobak manual berukuran kecil serta defisit kapasitas daya tampung wadah penampung utama. Implikasinya, kinerja pengangkutan petugas menjadi tidak maksimal dan memicu penumpukan residu di sejumlah sudut pasar. Kondisi carut-marut ini belum sejalan dengan tesis fundamental dari George R. Terry (2019:15) dalam prinsip manajerial, yang menegaskan bahwa fungsi perencanaan wajib menetapkan arah sasaran serta merumuskan seluruh prasyarat kebutuhan logistik masa depan demi menjamin tercapainya visi organisasi secara mutlak.

b. Penyusunan target

Formulasi target merupakan penetapan indikator capaian yang ingin diwujudkan dalam manajemen kebersihan, seperti eskalasi higienitas area niaga, pembatasan volume timbulan material buangan, hingga stimulasi kepedulian para pedagang dan konsumen pasar. Berdasarkan hasil telaah dokumen wawancara serta pengamatan langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan target kerja dalam tata kelola sampah di Pasar Ampah masih dikategorikan belum baik. Meskipun kru kebersihan tetap konsisten menjalankan rutinitas harian seperti menyapu koridor lapak dan memobilisasi sampah setiap hari, hasil operasionalnya belum menyentuh level optimal karena residu yang berserakan masih jamak dijumpai di sejumlah sudut pasar.

Kondisi tersebut membuktikan bahwa tata kelola di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan teori manajemen dari George R. Terry (2019:15), yang menegaskan bahwa fungsi perencanaan wajib mengintegrasikan penetapan sasaran atau target spesifik yang ingin diraih dalam suatu program kerja. Absennya parameter capaian yang terukur dan terstruktur di Pasar Ampah menyebabkan orientasi kerja penanganan sisa buangan terjebak dalam siklus formalitas harian semata, tanpa adanya arah pengembangan mutu lingkungan yang visioner.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2. Pengorganisasian
   a. Struktur organisasi pengelolaan sampah

      Struktur organisasi tata kelola sisa buangan merupakan kerangka formal yang mempertemukan berbagai pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan di Pasar Ampah, mencakup UPTD Pasar, satuan tugas kebersihan, hingga instansi sektoral terkait. Berdasarkan hasil rekonstruksi wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, bagan kepengurusan ini sebenarnya sudah terbentuk secara legal, namun pemahaman fungsi dari tiap personel pelaksana dinilai belum merata. Akibatnya, efisiensi birokrasi di area niaga tradisional tersebut saat ini hanya berada pada kategori cukup baik.

      Fenomena ini bersinggungan dengan tesis George R. Terry (2019:15) mengenai fungsi organizing, yang mendefinisikan pengorganisasian sebagai aktivitas menata serta mengonstruksikan hubungan kerja antarindividu di dalam wadah lembaga demi mengamankan target secara efektif. Di Pasar Ampah, implementasi penataan tersebut tercermin melalui distribusi peran antara pembersih lapangan, manajemen pasar, serta dinas terkait. Kendati demikian, fungsionalitasnya belum berjalan maksimal lantaran terganjal oleh lemahnya aspek koordinasi komunikasi serta longgarnya pengawasan dalam memelihara higienitas pasar.

   b. Pembagian tugas dan tanggung jawab

      Distribusi peran serta tanggung jawab fungsional merupakan ketetapan krusial dalam mendefinisikan porsi kerja setiap elemen dalam manajemen sisa buangan, seperti zonasi kerja petugas kebersihan saat memobilisasi sampah, peran pengelola pasar selaku supervisor, hingga kewajiban moral para pedagang untuk memelihara higienitas lapak dagang mereka. Berdasarkan hasil konfirmasi wawancara dan pengamatan berkala di lapangan, secara umum pembagian tugas di antara lini operasional internal Pasar Ampah dinilai sudah berjalan dengan baik.

      Kondisi empiris ini selaras dengan premis manajemen dari George R. Terry (2019:15) yang menegaskan bahwa fungsi pengorganisasian wajib mencakup spesifikasi pembagian kerja, pemetaan hubungan hierarki, serta penempatan aparatur sesuai kompetensinya demi meraih visi lembaga. Di Pasar Ampah, implementasi ini mewujud melalui kejelasan jadwal menyapu, pengangkutan armada, hingga monitoring lapangan. Namun, efisiensi sistem ini belum menyentuh level optimal akibat terbentur kendala struktural berupa defisit jumlah personel kebersihan di lapangan.

3. Pelaksanaan
   a. Pengumpulan sampah

      Aktivitas pengumpulan sisa buangan merupakan fase krusial dalam menyapu, menghimpun, dan memobilisasi residu pedagang serta pengunjung dari koridor lapak menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) demi meminimalkan risiko pembusukan massal. Meski krusial, data empiris dari wawancara mendalam mengonfirmasi bahwa eksekusi penanganan awal di Pasar Ampah masih rapuh. Mayoritas informan kunci, mulai dari Kepala UPTD, pengawas, hingga kru kebersihan lapangan menegaskan adanya defisit instrumen kerja yang masif dan usang. Kendati pihak Dinas Lingkungan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Hidup mengklaim penyediaan kontainer sudah sesuai standar teknis, para pedagang dan konsumen tetap mengeluhkan fakta bahwa kapasitas bak penampung utama sangat minim dan sering kali overkapasitas.

Berdasarkan hasil pengamatan visual di lapangan, rapuhnya sistem ini diperparah oleh absennya wadah sampah pilah organik-anorganik serta buruknya tata ruang TPS, yang memicu tumpukan material sisa berserakan saat aktivitas perniagaan memuncak. Keterbatasan armada angkut ini memvalidasi anomali sistemik yang sebelumnya telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Realitas carut-marut ini belum sejalan dengan substansi teori actuating (pelaksanaan) dari George R. Terry (2019:15), yang menegaskan bahwa implementasi kerja wajib menggerakkan secara optimal seluruh dimensi sumber daya guna menjamin efektivitas serta efisiensi program. Dalam kasus ini, defisit sarana fisik bertindak sebagai jangkar yang menghambat keberhasilan sanitasi pasar.

b. Pengangkutan sampah

Mobilisasi material buangan merupakan rangkaian aktivitas pemindahan sisa sisa utilitas dari lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dieksekusi oleh satuan tugas kebersihan. Berdasarkan hasil pengamatan berkala di lapangan, peneliti menemukan bahwa agenda pemindahan sisa buangan ini sudah berjalan cukup konsisten dan terjadwal dengan baik pada waktu pagi hari. Seluruh residu yang diproduksi di koridor niaga dikompilasi secara teratur ke bak TPS sebelum dievakuasi menggunakan armada operasional kedinasan. Kendati demikian, fluktuasi penumpukan zat sisa di area TPS terkadang masih terjadi akibat lonjakan volume buangan harian yang melebihi estimasi normal.

Secara konseptual, dinamika ini selaras dengan teori actuating (pelaksanaan) yang digagas oleh George R. Terry (2019:15), yang menyebutkan bahwa implementasi lapangan merupakan sebuah ikhtiar terpadu untuk menggerakkan seluruh instrumen sumber daya agar program kerja berjalan harmonis sesuai cetak biru organisasi. Konsistensi kru kebersihan Pasar Ampah dalam mengangkut sampah setiap hari membuktikan adanya komitmen kerja yang linier dengan rencana operasional pasar. Namun, efektivitas capaiannya di tingkat tapak belum menyentuh level paripurna lantaran masih membentur kendala overkapasitas muatan lokal pada hari-hari sibuk pasar.

c. Pemilahan sampah

Pemisahan material sisa berdasarkan karakteristiknya, seperti fraksi mudah membusuk (organik) dan fraksi sulit terurai (anorganik), merupakan langkah krusial untuk mempermudah proses daur ulang atau konversi nilai guna selanjutnya. Kendati demikian, hasil wawancara mendalam dan pengamatan visual di lapangan mengonfirmasi bahwa aktivitas pemilahan di Pasar Ampah masih dikategorikan belum baik. Seluruh residu domestik pedagang dan pengunjung dibiarkan tercampur baur dalam satu wadah penampungan, yang pada gilirannya memicu stagnasi efisiensi operasional kebersihan pada fase berikutnya.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Kondisi carut-marut ini memperkuat anomali sistemik yang tertuang pada poin-poin pendahuluan, yakni absennya kompartemen sampah sekat di koridor niaga serta rendahnya kepedulian moral komunal untuk memilah sisa buangan sejak dari hulu. Realitas di tapak empiris ini belum selaras dengan esensi teori actuating (pelaksanaan) dari George R. Terry (2019:15), yang menegaskan bahwa implementasi program wajib menggerakkan seluruh lini sumber daya secara efektif dan efisien demi meraih target organisasi. Nihilnya pemisahan fraksi sampah ini membuktikan adanya mata rantai operasional yang terputus, sehingga menghambat terwujudnya ekosistem pasar yang sehat.

4. Pengawasan
   a. Pengawasan terhadap petugas kebersihan

Monitoring terhadap satuan tugas kebersihan merupakan esensi dari aktivitas supervisi kinerja dalam mengeksekusi sterilisasi koridor niaga, termasuk ketepatan jadwal mobilisasi sampah agar selaras dengan regulasi baku. Berdasarkan hasil rekonstruksi wawancara dan pengamatan langsung, lini pengawasan operasional di Pasar Ampah dikategorikan sudah berjalan dengan baik, dipelopori oleh kedinasan terkait. Sistem kendali mutu ini diterapkan secara berkala memanfaatkan pelaporan digital terintegrasi dan bukti dokumentasi visual via aplikasi WhatsApp. Di sisi lain, manajemen internal UPTD Pasar cenderung bersikap pasif tanpa pengawasan formal intensif karena mengklaim tiap aparatur lapangan telah menginternalisasi tupoksi masing-masing.

Temuan empiris ini secara otomatis menggugurkan asumsi awal pada bagian pendahuluan yang menduga adanya kelonggaran pengawasan birokrasi. Faktanya, simpul kemacetan sanitasi di Pasar Ampah murni berakar pada defisit instrumen fisik serta rendahnya moralitas ekologis pelaku pasar, bukan dipicu oleh disfungsi kontrol aparat. Secara teoretis, fenomena ini bersinggungan dengan konsepsi controlling dari George R. Terry (2019:15) yang menegaskan bahwa pengawasan bertindak sebagai instrumen pengawal agar realisasi program tegak lurus dengan cetak biru organisasi. Kendati fungsi kontrol di Pasar Ampah sudah eksis, efektivitas pencapaiannya belum menyentuh level paripurna akibat dinamika konsistensi penegakan sanksi di lapangan yang masih fluktuatif.

   b. Sikap dan perilaku pedagang terhadap keberihan lingkungan

Respon psikologis serta manifestasi tindakan para pelaku usaha terhadap higienitas ruang niaga mencerminkan derajat moralitas ekologis mereka, yang diukur lewat kepatuhan membuang sisa buangan pada tempat pembuangan yang sah serta menjauhi tabiat mengotori lingkungan. Berdasarkan jalinan data wawancara mendalam, disimpulkan bahwa karakter dan tabiat pedagang di Pasar Ampah masih sangat heterogen serta berada pada kategori belum baik. Sejumlah informan kunci mengonfirmasi adanya anomali perilaku di mana sebagian pedagang dengan sengaja melempar material residu secara sembarangan di koridor lapak, didorong oleh mentalitas keliru yang menganggap bahwa urusan sterilisasi wilayah sepenuhnya merupakan beban tugas kru kebersihan pasar.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Kenyataan pahit di lapangan ini memvalidasi problematika sosiologis yang tertuang dalam bagian pendahuluan mengenai rendahnya kepedulian komunal di area Pasar Ampah. Nihilnya partisipasi aktif dari para pelaku usaha ini secara otomatis mereduksi efektivitas tata laksana kebersihan secara makro. Jika dibedah menggunakan kacamata teori actuating (pelaksanaan) dari George R. Terry (2019:15), esensi manajemen lapangan pada hakikatnya adalah seni menggerakkan sekaligus menyelaraskan perilaku modal manusia agar bergerak sinergis menuju visi bersama. Rendahnya kesadaran ekologis konstituen pasar ini menjadi bukti otentik bahwa fungsi pengarahan belum berjalan optimal karena elemen internal pasar justru menjadi agen pemicu penumpukan sisa buangan.

A. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolan Sampah di Pasar Ampah Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur

1. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah
   b. Perencanaan progran
   c. Tidak adanya pemilahahan sampah
   d. Kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat dalam kebersihan
   e. Belum adanya penyusunan target pengelolaan sampah secara khusus
   f. Keterbatasan jumlah petugas kebersihan
2. Faktor Pendukung
   a. Pengangkutan sampah yang dilakukan secara rutin
   b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
   c. Pengawasan terhadap petugas kebersihan
   d. Pengumpulan sampah secara rutin

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi mendalam mengenai manajemen kebersihan di Pasar Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, disimpulkan bahwa tata laksana yang mengadopsi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan ini secara umum masuk dalam kategori cukup baik, meski efektivitasnya di tingkat tapak belum optimal. Rapor evaluasi ini ditandai oleh dua dimensi konklusi utama. Pertama, dari segi fungsionalitas manajemen, aspek perencanaan dan penyusunan target kerja dinilai masih lemah karena absennya blueprint tertulis serta pengadaan sarana fisik baru. Pada lini pengorganisasian, bagan struktural birokrasi dinilai cukup baik, sementara pembagian porsi tugas di antara aparatur operasional sudah berjalan baik. Selanjutnya, pada tahapan implementasi, aktivitas pengumpulan serta mobilisasi angkutan harian ke TPS tergolong konsisten, namun terganjal oleh buruknya sistem pemilahan fraksi organik dan anorganik. Dari sudut pandang kontrol, pengawasan kinerja petugas lapangan sudah berjalan optimal lewat supervisi UPTD, tetapi terhambat oleh rendahnya kesadaran ekologis para pedagang dan konsumen yang masih gemar mengotori pasar. Kedua, dinamika ini dipengaruhi oleh hambatan struktural seperti defisit instrumen saniter, keterbatasan personel kebersihan, dan nihilnya target indikator yang jelas. Di sisi lain, faktor pendukung yang menopang sistem ini hanyalah rutinitas evakuasi sampah harian serta kejelasan garis komando antarentitas dinas terkait.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Data sampah nasional tahun 2025*. Badan Pusat Statistik.

Hadiwiyoto, S. (1983). *Pengelolaan limbah padat*. Penerbit Aksara.

Ibrahim. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang strategi nasional pengelolaan sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode* (Edisi ke-3). Sage Publications.

Nida, H. (2024). Pengelolaan Pasar Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Pelayanan Publik*, *1*(4), Halaman awal–akhir.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. (2020). Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Rahmadani, R. (2024). *Analisis pengelolaan sampah di Pasar Kecamatan Bangkinang Kota* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repositori Institusi.

Rahmawati, A. (2025). Pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Modern Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, *2*(1), Halaman awal–akhir.

Rohman, A. (2017). *Dasar-dasar manajemen*. Intelegensia Media.

Rusmila. (2014). *Kebijakan lingkungan berbasis komunitas*. CV Pustaka Setia.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarwono, & Saptono. (2014). *Konsep desain penelitian dalam kebijakan lingkungan*. Bilbithea Aneka Gama.

Suprihanto, J. (2014). *Manajemen*. Gadjah Mada University Press.

Terry, G. R. (2006). *Prinsip-prinsip manajemen* (Cetakan ke-8). Bumi Aksara.

Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Dasar-dasar manajemen*. Bumi Aksara.

Torang, S. (2014). *Organisasi dan manajemen*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.

Zahroh. (2015). Pendekatan dalam pengelolaan kelas. *Tasyri'*, *22*(2), Halaman awal–akhir.